



SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING THE CONTROL OF CENTRAL
GOVERNMENT TERN DEVELOPMENT PLANT ARRANGEMENT*

Oleh :

**Febrian Sandhi Festanto
NIM : 070710101122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

Oleh :

**Febrian Sandhi Festanto
NIM : 070710101122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Sepiro Gedhene Sengsoro Yen Tinompo Amung Dadi Coba*

Suro Diro Joyo Diningrat Lebur Dining Pangestuti*

Tangan Terkepal dan Maju Kemuka **

* Falsafah PSHT. AD/ART PSHT PUSAT. Setia: Madiun

** Motto PMII.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda DJOKO ERWANTO, SP. dan Ibunda Dra. INDAH PARASETYANINGRUM, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun, teriring doa semoga Tuhan selalu memberkahi Ayahanda dan Ibunda serta membalas semuanya dengan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Semua Bapak/Ibu Guru, dan Bapak/Ibu Dosenku yang telah mencurahkan ilmunya dengan bimbingannya yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, semoga ilmu yang telah dicurahkan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

**TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FEBRIAN SANDHI FESTANTO
NIM 070710101122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 Februari 2014

Oleh

Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO ,S.H.,M.H
NIP. 197002171998021001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI.,S.H.,M.H
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

Oleh

**FEBRIAN SANDHI FESTANTO
NIM 070710101122**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD,S.H.,M.H
NIP. 197002171998021001**

**ROSITA INDRAYATI.,S.H.,M.H
NIP.197805312005012001**

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Dr.WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.H
NIP.197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :Senin,

Tanggal :10

Bulan :Februari

Tahun :2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M
NIP. 196011221989021001

GAUTAMA BUDI ARUNDANTI S.H.,L.LM
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H.,M.H.
NIP.197002171998021001

.....

ROSITA INDRAYATI., S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIAN SANDHI FESTANTO

NIM : 070710101122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember , 10 Februari 2014

Yang Menyatakan,

FEBRIAN SANDHI FESTANTO
070710101122

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Rosita Indrayati,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M, selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Gautama Budi Arundati S.H.,L.LM, selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sekaligus Ketua Jurusan Bidang Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr.Widodo Ekatjahyana,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
6. Bapak Dr Nurul Gufron, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Racmad

Soetijono, S.H.,M.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;

7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
8. Ibunda tercinta Dra.Indah Parasetya N. yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
9. Ayahanda tercinta Djoko Erwanto, SP yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
10. Kekasihku tercinta Faristina Fadilah S.TP
11. Saudara-saudaraku di PSHT, Rachmat fajar w, Evi h, Eka Puji w, in'am, albertus willi, m surur, endro p, frendis, willa, doni, beni, fafa, fanani, adi sukrit, ita, heru, aan, royan lila, aryo, udin, febri, lili, cahyo,nur, neng, dila, sunda, aris, dan yang lain yang tidak dapat di sebutkan semuanya yang selama ini telah memberikan banyak sekali pembelajaran dengan kasih sayangnya
12. Sahabat-sahabatku di PMII, fuad, fiska, dodik, ebi, qoyim, sunda, rudi, dodik magetan, syapril, hendra, sukma, risky madura, feri, lubi, mambu, dik aji, gus cilik, nyenot, brodin, muso nif, ngeldik, adil, gesang, irma, ochi, davin, tutus, dan yang lain yang selama ini trus memperjuangkan agama dan Indonesia
13. Teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UJ) angkatan 2007 :teman-teman lainnya yang tidak tersebut dalam skripsi ini;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih

baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 10 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Maksud disusunnya RPJM Daerah adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Tujuan disusunnya RPJM Daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan

berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rencana pembangunan ini harus sejalan dengan visi pembangunan pemerintahan yang lebih tinggi serta harus berdasarkan pada ciri khas daerah tersebut. Supaya rencana pembangunan tersebut dapat sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam hal ini hukum Pemerintahan Daerah yang menunjukkan adanya perkembangan dari setiap tahunnya terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Peraturan Daerah memiliki posisi dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya tidak luput dalam tatanan sistem prinsip yang berlaku. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta keharusan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya adalah hal yang perlu senantiasa dihormati dalam bingkai negara hukum. Temuan tentang adanya mekanisme yang belum sesuai dalam konteks penyelesaian perselisihan antar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memerlukan perhatian yang serius agar tercipta kepastian hukum dan tercapainya *good legislation governance* dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Saran Kelemahan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah adanya pemahaman Pemerintah Daerah bahwa kewenangan seluas-luasnya serupa dengan konsep kewenangan negara bagian pada negara federal sehingga seringkali Pemerintah Daerah bertindak *ultra vires* dengan membuat berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka disarankan adanya upaya setiap Pemerintah Daerah mengubah paradigma tersebut agar tercipta kesatuan dan persatuan bangsa dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat. Sehingga kedepan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam peraturan yang di buat oleh pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Umum	3
1.3 Tujuan Tulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum Sekunder	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengawasan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah	8
2.2 Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah	10

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut	
Hukum Pemerintah Daerah.....	14
BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Bentuk Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Penyusunan	
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	18
3.1.1 Pengawasan Pemerintah Terhadap Rencana Pembangunan	
Jangka Menengah Daerah	29
3.1.2 Pengawasan oleh Mahkamah Agung	30
3.2 Penyelesaian Sengketa Pemerintah Daerah dengan Pemerintah	
dalam Hal Pembatalan Perda (RPJMD)	32
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	40
DAFTAR BACAAN.....	42
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	42